

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Korea Selatan melalui Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia membentuk beberapa kebijakan dalam bentuk program pendidikan, budaya, dan literasi yang memanfaatkan media sosial untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam upaya menyebarkan budaya Korea di Indonesia dan menciptakan citra positif Korea khususnya di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara ASEAN dan Republik Korea melalui ASEAN-Republic of Korea Plan of Action To Implement The Joint Declaration on Strategic Partnership For Peace and Prosperity periode 2016-2020 dalam memperkuat dan memperdalam kerja sama strategis antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi semakin erat.

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasionalnya, Pemerintah Korea Selatan membentuk beberapa program dalam mendukung penyebaran budayanya di Indonesia, antara lain:

- a. Diplomasi publik dalam sektor pendidikan melalui King Sejong Institute Jakarta yang merupakan salah satu cabang dari King Sejong Institute Foundation dalam upaya penyebaran bahasa Korea secara efisien serta menjadikan bahasa Korea sebagai bahasa asing kedua di dunia, terutama Indonesia. Melalui King Sejong Institute Jakarta, publik di Indonesia dapat berkesempatan mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea secara *online* atau pun *offline*. King Sejong Institute Jakarta juga didukung penuh oleh pemerintah Korea dalam segi kurikulum serta fasilitas pengajaran untuk mendukung pembelajaran, pendidikan, atau distribusi bahasa dan budaya Korea di Indonesia. Dalam memperluas pengetahuan publik terhadap program-program kelasnya, King Sejong Institute Jakarta memanfaatkan media sosial Instagram dan YouTube dalam mengunggah postingan-

postingan mengenai kegiatan budaya setiap bulannya dan informasi mengenai penerimaan kelas bahasa Korea yang dapat diikuti oleh umum dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang lengkap dipenuhi secara langsung oleh pemerintah Korea. Melalui media sosial, King Sejong Institute Jakarta memiliki tujuan untuk menarik antusiasme masyarakat Indonesia untuk bisa mengikuti kelas budaya Korea secara gratis, lalu tertarik untuk secara lanjut mempelajari bahasa Korea sehingga dapat menjadi Sumber Daya Manusia yang menguntungkan secara mutual.

- b. Diplomasi publik dalam sektor budaya dan seni melalui program Sahabat Korea yang dibentuk dan dijalankan langsung oleh Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, serta program Honorary Reporters KOREA.NET yang dibentuk oleh Korean Culture and Information Service (KOCIS) yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea. Melalui Sahabat Korea, pemerintah Korea menerapkan sistem *'influencer'* menggunakan media sosial Instagram dan *blog* dalam menjalankan diplomasi publiknya untuk mengekspansi budaya Korea di Indonesia dengan secara rutin merekrut para pemuda dengan rentan usia yang luas untuk dapat bergabung dan menjadi aktor dalam misi menggugah postingan-postingan mengenai budaya Korea dan segala aktifitas atau acara yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia kepada khalayak di Indonesia. Selain Sahabat Korea, pemerintah Korea juga menyediakan program Honorary Reporters melalui KOREA.NET untuk Indonesia sebagai wadah bagi publik di Indonesia untuk dapat berperan langsung dalam mengekspansi budaya Korea, memberikan informasi menyeluruh tentang Korea serta aktifitas kerja sama internasionalnya di dunia. Honorary Reporters Indonesia bertugas untuk membuat artikel mengenai konten-konten yang berpusat pada Korea, acara-acara budaya yang diadakan di Indonesia dan kegiatan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia yang mana artikelnya akan dipublikasikan melalui *website* resmi KOREA.NET dan Instagram KOREA.NET.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis menyadari bahwa Korea Selatan sangat maksimal dalam melakukan praktik diplomasi budayanya dengan mengikutsertakan publik di dalamnya. Sebagai negara monokultur, Korea Selatan berhasil mengemas budaya dalam skala sekecil apa pun untuk dapat diterima oleh publik dengan menarik. Namun, di tengah usaha pemerintah Korea dalam melaksanakan diplomasi publiknya melalui program-program yang sudah mereka bentuk, penulis juga menyadari beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Agar Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui program Sahabat Korea dapat menjangkau aktor dengan skala yang lebih luas, misalnya dengan mengikutsertakan *content creator* penggiat Korea sebagai *ambassador* yang saat ini banyak muncul di media sosial Instagram atau pun TikTok agar target publik yang dijangkau lebih luas dan beragam. Sehingga, informasi mengenai Korea juga dapat menyebar secara maksimal.
- b. Kedutaan Besar Korea di Indonesia lebih transparan dengan laporan setiap akhir tahun mengenai seberapa banyak kegiatan diplomasi publik yang telah diadakan dalam bentuk statistik, dan juga lebih transparansi dalam ketersediaan akses bagi publik untuk ikut menikmati kegiatan yang diadakan oleh program-program diplomasi publik, contohnya seperti acara *webinar* yang diadakan secara *live* di YouTube untuk tetap dipublikasikan agar dapat diakses kembali oleh publik.
- c. Dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber, penulis melihat bahwa program-program yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia masih kurang promosi secara umum ke target di luar pecinta budaya populer Korea dan kurangnya kolaborasi dengan media lokal. Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat terhadap hal ini agar pemerintah Korea Selatan dapat berkolaborasi dengan media asing dalam melakukan diplomasi publik sehingga pelaku diplomasi publik Korea Selatan yang dibentuk dalam beberapa program dapat memiliki langkah yang lebih luas untuk menyebarkan informasi mengenai budaya Korea di Indonesia.

- d. Dari hasil wawancara, penulis juga menyadari bahwa masih kurangnya fasilitas dari pemerintah Korea yang dapat mendorong publik untuk melakukan kegiatan diplomasi publiknya. Narasumber kedua dari program Honorary Reporters mengungkapkan bahwa jurnalis tidak diberikan tanda pengenal secara khusus yang mana hal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan mereka otoritas penuh saat melakukan peliputan di luar program atau acara yang dibuat oleh pemerintah Korea. Anggota Honorary Reporters hanya memiliki tanda pengenal jurnalis dalam bentuk *soft copy* yang mana menurut mereka masih kurang mendukung dalam melakukan aktivitas peliputan. Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat terhadap hal ini agar pemerintah Korea Selatan dapat memberikan fasilitas maksimal terhadap anggota-anggota diplomasi publiknya agar ekspansi budayanya juga dapat berjalan secara maksimal.

